



2017



LAPORAN AKHIR

SEKSI KAPASITAS DESA DAN KELURAHAN

BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan.....	1
C. Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2
BAB II PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN	4
A. Program dan Kegiatan	4
B. Sasaran	4
BAB III PELAKSANAAN	
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
B. Data Pendukung	5
BAB IV. HASIL PELAKSANAAN	
A. Fasilitasi Program/Kegiatan Pelatihan Kapasitas Desa dan Kelurahan	6
B. Pembinaan pada 7 Kab dan 3 Kota	6
C. Monitoring dan Evaluasi	6
BAB V. PENUTUP	
A. Hambatan dan Permasalahan	10
B. Kesimpulan dan Saran	10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan ridhoNya jualah, maka **“Laporan Akhir”** Pelaksanaan Kegiatan Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan – kegiatan Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2017.

Untuk tercapainya Pembangunan Desa yang berkualitas maka Pemerintah Desa wajib mendapatkan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berupaya memberikan peningkatan kemampuan bagi Aparat Kabupaten, Aparat Pemerintah Desa, melalui Kegiatan Pembinaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penguatan Manajemen Kelurahan Se- Kalimantan Timur.

Demikian laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan bagian dari kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Samarinda, Desember 2017
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dra. Riani Tisnadewi, MM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Type A yang tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pemdeskel) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok Bidang Pemdeskel adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan administrasi desa dan pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa/kelurahan.

Fungsi Bidang Pemdeskel adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan dan kapasitas desa.
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan administrasi desa dan pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian pengembangan dan administrasi desa.
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan tatacara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
11. Peraturan Pemerintah dan Permendagri Tahun 2016 Tentang Desa dan Kelurahan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pemebentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan .
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Lurah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang RPJMDesa.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan dan Petunjuk Teknis RPJMDesa.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
21. DPA DPMPD TA. 2018

C. KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

1. Penetapan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Skala Provinsi .
2. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan :
 - a. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi ;
 - b. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi.

3. Penetapan Pedoman :

- a. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi ;
- b. Penetapan Pedoman Pengembangan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Skala Provinsi ;

4. Pembinaan, Pengawasan dan Supervisi Penyelenggaraan :

- a. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi;
- b. Pembentukan, Pemekaran Penggabungan dan Penghapusan Batas Desa dan Kelurahan Skala Provinsi;
- c. Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Skala Provinsi ;
- d. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- e. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Skala Provinsi.

5. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Penyelenggaraan :

- a. Pembinaan Penyusunan Pembangunan Rencana Jangka Menengah Desa
- b. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Skala Provinsi.
- c. Penguatan Manajemen Kelurahan.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melaksanakan program dan kegiatan :

1. **Program** Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui **Kegiatan** Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2017 Melaksanakan antara lain ;

- a. Menfasilitasi program Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pelatihan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa, yang di selenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dengan sumber dana DIPA – APBN.
- b. Melaksanakan Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Timur berupa penyampaian surat – surat yang terkait dengan Pemutakhiran data Lurah Se – Kalimantan Timur, Data Kepala Desa Se – Kalimantan Timur, Data Pilkades Serentak Se – Kalimantan Timur, Data Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Se – Kalimantan Timur dan Data Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PTPD) dan Data Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Se – Kalimantan Timur.
- c. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan terkair Peningkatan Kapasitas Desa dan Kelurahan Se – Kalimantan Timur.

B. SASARAN

Sasaran yang dicapai Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Telaksananya program/kegiatan Bidang Pemerintahan Desa secara efesien dan efektif.
2. Penyatuan persepsi dalam pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Terwujudnya Kemampuan dan Kemandirian Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya.
4. Termotivasinya Aparatur Desa/Kelurahan dalam upaya peningkatan potensi dan sumberdaya Desa.

BAB III PELAKSANAAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. **Fasilitasi Progran/Kegiatan Pelatihan Kapasitas Desa/Kelurahan**

Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 November 2017 bertempat di Hotel Novotel Jalan. Brigjen Ery Suparjan No. 02 **Balikpapan**

2. Memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota berupa penyampaian surat – surat sejak bulan Januari s.d Desember terkait Pemutakhiran Data – data.

3. **Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Pelaksanaan Monitiring, Evaluasi dan Pembinaan dilaksanakan melalui Koordinasi, konsultasi, secara langsung maupun melalui Telpon, Email dan melalui media sosial (WhatsApp) sejak Bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2017, di 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota.

B. Data Pendukung

Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se - Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jlh. Kecamatan	Jlh. Kelurahan	Jlh Desa/Kampung
1	Kabupaten P a s e r	10	5	139
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	18	44	193
3	Kabupaten B e r a u	13	10	100
4	Kabupaten Kutai Barat	16	4	190
5	Kabupaten Kutai Timur	18	2	139
6	Kabupaten P P U	4	24	30
7	Kabupaten Mahakam Ulu	5	0	50
8	Kota Balikpapan	6	34	0
9	Kota Samarinda	10	59	0
10	Kota Bontang	3	15	0
	Jumlah	103	197	841

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN

A. Fasilitas Program/Kegiatan Pelatihan Kapasitas Desa/Kelurahan

Pelaksanaan Pelatihan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 November 2017 bertempat di Hotel Novotel Jalan. Brigjen Ery Suparjan No. 02 **Balikpapan**, dengan jumlah peserta **sebanyak 30 orang** dari rencana semula sebanyak **35 orang**. Hal ini terjadi dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk Peningkatan Kapasitas di beberapa kecamatan yang terpanggil.

Data Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang mengikuti Pelatihan PTPD Tahun 2017

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Seksi		Yang Telah Mengikuti Pelatihan			
					Sudah		Belum	
			Pem	PMD	Pem.	PMD	Pem.	PMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Paser	10	10	10	-	5	10	5
2.	Kutai Kartanegara	18	12	12	3	2	9	10
3.	Berau	13	10	8	3	-	7	8
4.	Kutai Barat	16	15	15	2	3	13	12
5.	Kutai Timur	18	17	15	3	3	14	12
6.	Penajam Paser Utara	4	4	4	-	2	4	2
7.	Mahakam Ulu	5	4	-	4	-	0	-
Jumlah		84	72	64	15	15	57	49

B. Pembinaan pada 7 Kabupaten dan 3 Kota Se – Kalimantan Timur.

Pelaksanaan Memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota berupa penyampaian surat – surat sejak bulan Januari s.d Desember terkait Pemutakhiran Data dan Lain – lain yaitu

- Undangan Peserta TOT PTPD Wilayah III
- Undangan Rakernis Ketentraman dan dan ketertiban Desa
- Undangan Rakernis penguatan kelembagaan BPD
- Undangan Rakernis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Undangan Rakornas Percepatan Pelks. Progran Prioritas Pembangunan Desa
- Inventarisasi Data Pemerintahan Desa
- Undangan Rakosnas Pemdes dan Daerah Tahun 2017
- Pemutakhiran Data Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

- i. Undangan Workshop Evaluasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa T.A. 2017
- j. Permintaan Peserta Pelatihan PTPD di Balikpapan Prov. Kalimantan Timur
- k. Pemutakhiran Data Pengurus Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
- l. Pemutakhiran Data Kepala Desa Se – Kalimantan Timur
- m. Pemutakhiran Data Lurah Se – Kalimantan Timur
- n. Pemutakhiran Data Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- o. Pemutakhiran Data Desa/Kampung yang melaksanakan Pilkada Serentak
- p. Pemutakhiran Data Program/Kegiatan PKAD/PTPD Kecamatan

C. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan dilaksanakan melalui Koordinasi, konsultasi, secara langsung maupun melalui Telpon, Email dan WhatsApp sejak Bulan Januari s. d bulan Desember tahun 2017, di 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) Kota. Dengan Data – Data sebagai berikut ;

- a. Data Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Se – Kalimantan Timur;

No.	Kabupaten	Jlh. Kecamatan	Jabatan		Keterangan
			Kasi Pem.	Kasi PMD	
1.	Paser	10	10	10	
2.	Kutai Kartanegara	18	12	12	12. formasi kosong
3.	B e r a u	13	10	8	8. formasi kosong
4.	Kutai Barat	16	15	15	2. formasi kosong
5.	Kutai Timur	18	17	15	4. formasi kosong
6.	Penajam Paser Utara	4	4	4	
7.	Mahakam Ulu	5	4	-	4 formasi kosong
	Jumlah	84	72	64	

Ket ; Untuk Jabatan Kasi Pemerintahan Dan Kasi PMD ; Kab. Paser, Kab. PPU semua jabatan terisi sedangkan untuk Kab. Kutai Kartanegara yang seharusnya ada 36 Formasi baru terisi 24 Formasi, Kab. Berau dari 26 Formasi baru Terisi 18 formasi, Kab. Kutai Barat dari 32 foemasi baru terisi 30 formasi, Kab. Kutai Timur dari 36 formasi baru terisi 32 formasi, dan Kab. Mahakam Ulu ada 8 formasi baru terisi 4 formasi.

b. Data Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak

DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SE- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2017

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KAMPUNG	TAHUN PELAKSANAAN PILKADES			KETERANGAN
				2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PASER	10	139	-	71	-	Tgl Plksn 7 December 2016
2	KUTAI KARTANEGARA	18	193	-	71	-	Tgl Plksn 15 Sept 2016
3	BERAU	13	100	27	-	53	Tgl plksn 10 November 2015
							Tgl plksn 25 Oktober 2017
4	KUTAI BARAT	16	190	-	-	100	Tgl Plksn 30 Maret 2017
5	KUTAI TIMUR	18	139	-	78	-	Tgl Plksn 20 December 2016
							dari 78 desa yang seharusnya pilkades, satu desa yaitu Desa Long Noran Kec. Telen ditunda karena personal conflict
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	14	-	14	Tgl Plksn 27 November 2017
7	MAHAKAM ULU	5	50	-	-	-	
TOTAL		84	841	41	220	167	

Keterangan: Dari data di atas dapat terlihat jumlah Desa yang telah mengikuti melaksanakan PILKADES serentak pada tahun 2017 yaitu sebanyak 167 desa, untuk selanjutnya Pilkades serentak di Kabupaten Paser direncanakan digelar usai pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim pada 2018 mendatang, yaitu sekitar bulan Juni atau Juli. Rencananya ada 14 Desa dari 6 (enam) Kecamatan yang akan ikut serta dalam Pilkades tersebut.

- c. Data Kepala Desa yang Telah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Dana Dekonsentrasi

**Data Kepala Desa/Kampung/Petinggi
Yang Telah Mengikuti Pelatihan PTPD Tahun 2015**

No.	Kabupaten	Jlh. Desa	Pelatihan PKAD		Keterangan
			Sudah	Belum	
1.	Paser	139	76	63	
2.	Kutai Kartanegara	193	127	66	
3.	B e r a u	100	59	41	
4.	Kutai Barat	190	101	89	Dana Dekonsentrasi T.A 2015
5.	Kutai Timur	134	41	93	
6.	Penajam Paser Utara	30	14	16	
7.	Mahalam Ulu	50	7	43	
Total		836	425	411	

**Data Kepala Desa/Kampung/Petinggi
Yang Telah Mengikuti Pelatihan PTPD Tahun 2017**

No.	Kabupaten	Jlh. Desa	Pelatihan PKAD		Keterangan
			Sudah	Belum	
1.	Paser	139	10	129	Adanya Pemekaran dan Pilkades Serentak
2.	Kutai Kartanegara	193	67	126	
3.	B e r a u	100	-	100	
4.	Kutai Barat	190	8	182	
5.	Kutai Timur	139	-	139	
6.	Penajam Paser Utara	30	-	30	
7.	Mahalam Ulu	50	-	70	
Total		841	85	756	

Keterangan: Dari data di atas dapat terlihat jumlah Kepala Desa yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebanyak 425 kepala desa, dan sejak di laksanakan nya PILKADES serentak di beberapa kabupaten dan adanya pemekaran desa di Kabupaten Kutai Timur, dari tahun 2015 sd tahun 2017 kepala desa yang telah di latih mengalami penurunan hingga hanya tersisa 85 Kepala desa saja.

BAB V

PENUTUP

A. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN

1. Hambatan

- a. Pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi penjadwalan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Kondisi anggaran di beberapa kecamatan yang sangat terbatas sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

2. Permasalahan

- a. Alokasi anggaran menunjang pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan masih sangat minim.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Desa/Kelurahan terhadap pelayanan pada masyarakat.
- c. Belum optimalnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan aparatur Desa /Kelurahan terhadap Manajemen Pemerintahan Desa.
- d. Masih rendahnya peran aktif aparatur Desa/Kelurahan dalam proses Pemerintahan dan perencanaan pembangunan desa.
- e. Masih kurangnya data pendukung potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa/Kelurahan.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan yang telah di laksanakan Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dari bulan Januari hingga Desember Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- b. Dengan di laksanakannya Pilkades serentak di hampir semua kabupaten di Kalimantan Timur maka perlu perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa agar Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkatnya) dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang – undang dan peraturan yang berlaku.
- c. Agar terlaksananya Program/Kegiatan Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan sesuai dengan renja maka diharapkan perhatian dan partisipasi pemerintah dan kepala Dinas dalam penyediaan dukungan anggaran yang memadai.

2. Saran

- a. Penguatan sinkronisasi dan koordinasi program/kegiatan antara bidang teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan.
- b. Progam/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun – tahun lalu dipandang masih perlu diprogramkan/dialokasikan kembali di tahun anggaran 2018
- c. Dalam rangka optimalisasi program/kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan diperlukan dukungan anggaran yang proposional.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintahan Desa khususnya dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa yang akan datang.

Samarinda, Desember 2017

Kepala Seksi
Kapasitas Desa dan Kelurahan,

Huzaimah, SP